JUAL BELI *ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

M. Syukran Yamin Lubis
muhammadsyukran@umsu.ac.id

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Harisman
harisman@umsu.ac.id

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak

Salah satu perkembangan yang signifikan sekarang adalah transaksi jual beli secara online atau *E-Commerce*. Penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka (*face to face*) untuk melakukan transaksi jual beli, melainkan hanya perlu memiliki koneksi internet yang akan mempertemukan mereka di dunia virtual. Eksistensi *E-Commerce* ini penting untuk dikaji aspek legalitasnya, agar tidak menjadi sengketa hukum yang dapat merugikan berbagai pihak secara komersial. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dan disimpulkan bahwa Jual beli dalam Islam telah diatur dalam beberapa ayat Al-Quran, yaitu: Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2: 198, Surat Al-Baqarah/2: 275 dan Surat An-Nisa/4: 29. Jual beli *online* tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, *sighat* (lafal ijab dan kabul), objek transaksi, dan nilai tukar barang, selama dalam transaksi itu tidak ada unsur haram, seperti riba, *gharar* (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, dan merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan tentunya barang atau jasa yang jadi objek transaksi adalah halal, bukan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits, seperti narkoba, bangkai, babi, dan lain-lain sebagainya.

Kata Kunci: jual beli, *online*, hukum, Islam

Pendahuluan

Arus globalisasi yang saat ini membuat jarak antar negara bukanlah suatu problematika lagi. Orang semakin mudah berhubungan dengan orang lain melalui perkembangan teknologi dan komunikasi. Salah satu perkembangan yang signifikan sekarang adalah transaksi jual beli secara online atau *E-Commerce*. Penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka (*face to face*) untuk melakukan transaksi jual beli, melainkan hanya perlu memiliki koneksi internet yang akan mempertemukan mereka di dunia virtual. Eksistensi *E-Commerce* ini penting untuk dikaji aspek

legalitasnya, agar tidak menjadi sengketa hukum yang dapat merugikan berbagai pihak secara komersial.

Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab, yaitu *al-Bay'* berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-Bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-Syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-Bay'* berarti "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli". Persoalan jual beli dalam fikih Islam dibahas secara luas oleh ulama fikih, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik kitab *al-Buy'* (kitab jual beli).¹

Dalam buku Fiqh Muamalah karya Hendi Suhendi, perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*,² sebagaimana Allah SWT. berfirman QS Fathir /35: 29:

يرجون تجارة لن تبورا

"Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi".

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

1. Menurut ulama Hanafiyah:
"Jual beli adalah Pertukaran Harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan".
2. Menurut Imam Nawawi:
"Jual beli adalah Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan".
3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni:
"Jual beli adalah Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik".³

Definisi lain dikemukakan ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata "milik dan pemilikan," karena ada juga tukar-menukar harta tersebut yang sifatnya bukan pemilikan, seperti sewa-menyewa (*Ijarah*).⁴

Berdasarkan hal itu, Islam telah menawarkan beberapa aturan dasar dalam transaksi, perjanjian, atau mencari kekayaan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an:
 - a. QS Al-Baqarah/2: 198:

ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم

¹Abdul Aziz Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Cet. I, hlm. 827.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Keenam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 67.

³Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Pertama, Makassar: Alauddin University Press, 2013, hlm. 49-50.

⁴*Ibid.*

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".

b. QS Al-Baqarah/2: 275

واحل الله البيع وحرم الربوا

Artinya: "Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Kata البيع (penjualan atau barter) secara lebih umum dipakai untuk perdagangan dan perniagaan serta berbagai macam transaksi. Sedangkan kata الربوا masih ada perbedaan pendapat. Menurut Ibnu Katsir, Umar bin Khattab masih menemukan beberapa kesulitan mengenai hal ini, karena Rasulullah saw. Telah berpulang sebelum persoalan ini dapat dituntaskan secara rinci. Dalam bahasa yang paling keras, riba dikutuk dan dilarang karenanya mereka sama dengan orang gila.⁵

c. QS An- Nisa/4: 29

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم

رحيما

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Dalam ayat ini telah terdapat larangan bagi orang-orang yang beriman dari memakan harta sesamanya secara batil, dan dijelaskan bentuk keuntungan yang halal dalam pemutaran harta, yaitu perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. Perniagaan merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara produsen dan konsumen yang dilakukan dengan memasarkan barang. Dengan demikian, terdapat usaha untuk memperbaiki produk dan memudahkan perolehannya sekaligus. Jadi perniagaan ini berarti pelayanan antara kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat melalui perniagaan. Perolehan manfaat yang didasarkan pada kemahiran dan kerja keras, tetapi pada waktu yang sama dapat saja diperoleh keuntungan atau kerugian.⁶

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah swt. melarang hamba-hambanya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang batil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian, dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syariat. Allah swt. mengecualikan dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.⁷

Demikian juga dikatakan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengenai ayat ini bahwa kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang

⁵Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hlm. 111.

⁶Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 2, (terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarakil), Muchotob Hamzah, Cetakan Pertama, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 341-342.

⁷Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy), Cetakan Pertama, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1998, hlm. 361.

melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapan duniawi berupa wanita, harta, dan tahta. Melalui ayat ini, Allah swt. mengingatkan orang-orang yang beriman untuk tidak memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil, yaitu tidak sesuai dengan tuntutan syariat, tetapi hendaknya memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.⁸

Dalam hal ini dalil yang digunakan oleh ulama yang membolehkannya adalah dengan akad salam. Melihat dari mekanisme jual beli *online* yakni dari segi majelis memungkinkan terjadinya proses jual beli dalam jangka waktu yang tidak ditentukan maka jual beli seperti ini digolongkan dalam akad salam. Adapun dalil yang dijadikan landasan hukum dalam melegalisasi akad salam yakni QS. al-Baqarah/2: 282. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas. Serta ijma' ulama yang dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat di dalamnya kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.

d. Hadits:

- 1) Telah meriwayatkan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi telah meriwayatkan kepada kami Marwan bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami Abdul al-Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahandanya berkata, saya telah mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah saw. sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.

e. Kaidah Fikih

Dalam fikih muamalah, hukum asal sesuatu itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan.

"Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."

Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai itu diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut *العادة محكمة* yang artinya: adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.⁹

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹⁰

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hlm. 497.

⁹A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 78.

¹⁰Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, hlm. 828.

Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli); b) *Sighat* (lafal ijab dan kabul); c) Ada barang yang dibeli; d) Ada nilai tukar pengganti barang.¹¹

Menurut ulama mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli, bukan rukun. Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama¹² adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut:

a. Berakal

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. *Jumhur ulama* berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil *baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2. Syarat yang terkait dengan ijab kabul

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa, dan akad nikah.¹³

Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:

a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal atau telah berakal, sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas;

b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: Saya jual tas ini seharga sepuluh ribu, lalu pembeli menjawab: Saya beli dengan harga sepuluh ribu;

c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.¹⁴

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan kabul atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.

¹¹*Ibid.*

¹²Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Makassar: Alauddin University Press, 2012, hlm. 119-133.

¹³Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, hlm. 829.

¹⁴Misbahuddin, *op. cit.*, hlm. 121.

Pada zaman sekarang, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli di super market, mall, dan toko-toko lainnya. Jual beli ini dalam fikih Islam disebut dengan *bay' al-mu'atah*.¹⁵

3. Syarat barang yang diperjualbelikan
 - a) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya disebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya karena masih dipabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu bisa dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual dan barang ini dihukumkan sebagai barang yang ada;
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Olehnya itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena menurut syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim;
 - c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti mempejualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual;
 - d) Bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
 - e) Syarat Nilai Tukar

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, ulama fikih mengemukakan beberapa syarat lain¹⁶ juga sebagai berikut:

- 1) Syarat sah jual beli

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal, yaitu:

 - a) Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, kuantitas, jumlah harga tidak jelas, mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak;
 - b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli dan harga barang bisa dikuasai penjual dan adapun barang yang tidak bergerak, bisa dikuasai oleh pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *urf* (kebiasaan) setempat.
- 2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad itu punya kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain terkiat dengan barang tersebut). Akad jual beli tidak bisa dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk secara langsung melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalm jaul beli. Dalam hal lain, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang

¹⁵*Ibid*, hlm. 122.

¹⁶*Ibid*., hlm. 126-127.

diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu bisa diberlakukan. Jual beli seperti ini dalam fikih disebut *bay' al-fuduli*.

3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli tersebut terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih bisa dibatalkan. Apabila syarat itu terpenuhi secara hukum, maka jual beli itu dianggap sah dan mengikat. Karena itu pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli tersebut.

Konsep Jual Beli Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁷ Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁸

Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan "didalam jaringan" atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *email*. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain.

Hukum Jual Beli Online Menurut Islam

Untuk mengetahui apakah jual beli *online* bertentangan atau tidak ditinjau dari hukum Islam, maka perlu dikomparasikan dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:

1. Orang yang berakad

Secara umum *al-'aqid* (pelaku) jual beli disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. Suatu akad dipandang tidak sah yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila, dan lain-lain. Sedangkan menurut ulama

¹⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 4, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 589.

¹⁸Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Kesepuluh, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 73.

Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan 'aqid harus *baligh*, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya.¹⁹

Dalam transaksi jual beli *online*, masing-masing pihak yang terlibat transaksi telah memenuhi kriteria *tamyiz*, dan telah mampu mengoperasikan komputer dan tentunya telah memenuhi ketentuan memiliki kecakapan yang sempurna dan mempunyai wewenang untuk melakukan transaksi dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan yang sempurna, seperti dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila.

Adapun keberadaan penjual dan pembeli, meskipun dalam transaksi jual beli *online* tidak bertemu langsung, akan tetapi melalui internet telah terjadi saling tawar-menawar atau interaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Dengan demikian syarat orang yang berakad dalam jual beli telah terpenuhi.

2. *Sighat* (lafal ijab dan kabul)

Sighat akad (ijab dan kabul) adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Wahbah al-Zuhaili memberi definisi akad dengan makna pertemuan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.²⁰ Ijab dan kabul merupakan unsur terpenting dari suatu akad karena dengan adanya ijab dan kabul, maka terbentuklah suatu akad (*contract*).

Dalam hukum Islam, pernyataan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau surat-menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam jual beli perantara, baik melalui orang yang diutus, maupun melalui media tertentu, seperti surat-menyurat, telepon. Ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara, baik dengan utusan atau melalui media tertentu adalah sah, apabila antara ijab dan kabul sejalan.²¹

Pelaksanaan ijab dan kabul juga harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. Adapun ijab dan kabul dibolehkan ditempat yang berbeda selama antara penjual dan pembeli sudah memahami satu sama lain. Pengertian satu majelis tidak sekedar pertemuan dalam satu ruangan secara fisik antara penjual dan pembeli, karena itu transaksi jual beli lewat sarana jarak jauh apa saja dapat dikategorikan sebagai satu majelis. Termasuk juga via telepon, internet, atau media cetak dan elektronik lainnya, asalkan masih dalam konteks yang sama, yaitu akad jual beli.

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli bertemu dalam satu majelis, yaitu yang dinamakan majelis maya. Penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat tertentu dalam arti secara fisik dan bisa saja transaksi dilakukan dari berbagai negara yang berbeda. Pada dasarnya, pernyataan kesepakatan pada transaksi jual beli *online* sama dengan pernyataan kesepakatan sebagaimana transaksi dalam hukum Islam. Pernyataan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai media, selama dapat dipahami maksudnya oleh penjual dan pembeli dan tentunya atas dasar kerelaan antara kedua pihak yang melakukan transaksi.

¹⁹Suhartono, "Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)", *Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 72, 2010, hlm. 143.

²⁰Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 81.

²¹Abdul Aziz Dahlan, ed., *op. cit.*, hlm. 830.

3. Objek transaksi jual beli

Objek transaksi jual beli harus ada atau tampak pada saat akad terjadi. Terhadap objek yang tidak tampak, ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak, kecuali dalam beberapa hal seperti jasa. Namun demikian, ulama fikih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara', seperti objek yang halal, dapat diberikan pada waktu akad, diketahui oleh kedua belah pihak, dan harus suci.²²

Dalam transaksi jual beli *online*, komoditi yang diperdagangkan dapat berupa komoditi digital dan nondigital. Komoditi digital seperti surat kabar elektronik, majalah *online*, *digital library*, *ebook*, domain, dan lain-lain, dapat langsung diserahkan kepada pembeli melalui media internet. Sedangkan komoditi *non digital*, tidak dapat diserahkan langsung melalui media internet, namun dikirim melalui jasa kurir sesuai dengan kesepakatan spesifikasi komoditi atau barang dan tempat penyerahan.

Dapat disimpulkan bahwa belum adanya komoditi pada saat akad, bukan berarti akadnya tidak sah ataupun dikategorikan *gharar*, karena objek dalam transaksi jual beli *online*, meski belum ada pada saat akad, tetap dipastikan ada kemudian hari.

Pembeli tidak dapat melihat langsung objek dalam transaksi jual beli *online*, karena yang ditampilkan di internet adalah berupa foto benda tersebut, sehingga pembeli sulit memastikan apakah barang itu ada atau tidak. Tetapi, barang yang ditransaksikan dalam jual beli *online* ini sebenarnya telah ada dan siap dikirim atau bersifat pemesanan. Mengenai jual beli barang yang tidak ada ditempat akad jual beli, dapat dilakukan asalkan kriteria atau syarat barang yang dijanjikan sesuai dengan informasi, maka jual beli tersebut sah.²³

4. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang

Para ulama telah sepakat bahwa nilai tukar pengganti barang dalam transaksi harus dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari, misalnya pembayaran dilakukan dengan uang, harus dijelaskan jumlah dan mata uang yang digunakan atau apabila dengan barang, maka harus dijelaskan jenis, kualitas, sifat barang tersebut.²⁴

Dalam transaksi jual beli *online*, sebelum proses pembayaran dilakukan, masing-masing pihak penjual dan pembeli telah menyepakati mengenai jumlah dan jenis mata uang yang digunakan sebagai pembayaran serta metode pembayaran yang digunakan, misalnya dengan kartu kredit. Pada saat penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan, kemudian melakukan pembayaran melalui bank, dan setelah pembayaran telah diterima oleh penjual dan pembeli telah mengirimkan bukti pembayaran atau kuitansi pembelian, maka penjual mengirim barang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang kepada pembeli.

Pembayaran harga dalam transaksi jual beli *online* pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam sistem perikatan Islam. Pembayaran atau harga dalam transaksi jual beli *online* merupakan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Uang yang digunakan sebagai alat pembayaran

²²Suhartono, *op. cit.*, hlm. 145.

²³Misbahuddin, *op. cit.*, hlm. 264.

²⁴Suhartono, *op. cit.*, hlm. 146.

pengganti barang dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan dibayarkan sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.

Pada dasarnya, jual beli termasuk muamalah yang hukumnya dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setelah mengkaji rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi jual beli *online* ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, *sighat* (lafal ijab dan kabul), objek transaksi, dan nilai tukar barang, selama dalam transaksi itu tidak ada unsur haram, seperti riba, *gharar* (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, dan merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan tentunya barang atau jasa yang jadi objek transaksi adalah halal, bukan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, seperti narkoba, bangkai, babi, dan lain-lain sebagainya.

Simpulan

Jual beli dalam Islam telah diatur dalam beberapa ayat Al-Quran, yaitu: Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2: 198, Surat Al-Baqarah/2: 275, Surat An-Nisa/4: 29. Jual beli *online* tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, *sighat* (lafal ijab dan kabul), objek transaksi, dan nilai tukar barang, selama dalam transaksi itu tidak ada unsur haram, seperti riba, *gharar* (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, dan merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan tentunya barang atau jasa yang jadi objek transaksi adalah halal, bukan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits, seperti narkoba, bangkai, babi, dan lain-lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Abdullah Yusuf, 1993, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Zuhali, Wahbah, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr.
- Cahyani, Andi Intan, 2013, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Pertama, Makassar: Alauddin University Press.
- Dahlan, Abdul Aziz, (ed), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djazuli, A., 2010, *Kaidah-kaidah Fikih Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana.
- Katsir, Ibnu, 1998, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2, (terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy). Cetakan Pertama. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Misbahuddin, 2012, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Makassar: Alauddin University Press.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 4, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Quthb, Sayyid, 2001, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, jilid 2, (terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarakil, Muchthob Hamzah), Cetakan Pertama, Jakarta: Gema Insani Press.
- Shihab, M. Quraish, 2007, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Lentera Hati.

- Suhartono, 2010, "Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)", *Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 72.
- Suhendi, Hendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Keenam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syafe'i, Rahmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Kesepuluh, Bandung: CV. Pustaka Setia.